

Media Relations Strategy of the Mojokerto Resort Police Public Relations Unit in Enhancing the Police Image

Strategi Media Relations Humas Polisi Resor Mojokerto Dalam Meningkatkan Image Kepolisian

Ahmad Ananta Raja Aditiya¹⁾, Ainur Rochmaniah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: ainur@umsida.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hubungan media yang diterapkan oleh unit Hubungan Masyarakat Kepolisian Mojokerto guna meningkatkan citra publik institusi tersebut. Hubungan media merupakan fungsi humas yang vital untuk membina hubungan harmonis dengan media massa dan membangun persepsi publik yang positif. Informan penelitian mencakup Kepala Seksi Humas dan dua orang jurnalis mitra. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga aspek strategis utama. Pertama, dalam mengelola hubungan, Humas membangun kedekatan yang kuat melalui Forum Piramida, sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan 28 outlet media terverifikasi, serta melalui transparansi informasi. Kedua, dalam pengembangan strategi, komunikasi direncanakan berdasarkan Kalender Kamtibmas, dengan memadukan media massa dan media digital serta pemantauan isu selama 24 jam oleh Tim Siber khusus. Ketiga, untuk memperluas jaringan media, Humas menginisiasi program Coaching Clinic guna meningkatkan keterampilan personel kepolisian di bidang jurnalistik, komunikasi, dan pemanfaatan media sosial.

Kata kunci - Strategi Media Relations; Humas Polres Mojokerto; Citra

Abstract. This study aims to analyze the media relations strategies implemented by the Public Relations unit of the Mojokerto Police to enhance the institution's public image. Media relations serves as a vital public relations function to foster harmonious relationships with mass media and build positive public perception. Research informants included the Head of the Public Relations Section and two partner journalists. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate three key strategic aspects. First, in managing relations, Humas builds strong rapport through the Piramida Forum, a WhatsApp group comprising 28 verified media outlets, and information transparency. Second, in developing strategies, communication is planned based on the Kamtibmas Calendar, combining mass and digital media with 24-hour issue monitoring by a dedicated Cyber Team. Third, to expand media networks, Humas initiated the Coaching Clinic program to improve police personnel's skills in journalism, communication, and social media usage.

Keywords - Media Relations Strategy; Mojokerto Police Resort Public Relations; Image

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk memastikan keamanan, menjaga ketertiban, dan menegakkan hukum. Citra kepolisian sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, mengingat interaksi langsung mereka dengan masyarakat. Namun demikian, kepercayaan publik terhadap Polri cenderung bervariasi. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa sebesar 80% publik menyatakan kepercayaan terhadap Polri pada tahun 2021. tetapi, menurun drastis menjadi sekitar 60% pada akhir tahun 2022 karena insiden yang melibatkan pejabat senior Polri. Meskipun sedikit pulih menjadi 76,4% pada Oktober 2023, survei Litbang Kompas (Kompas Research and Development) yang dilakukan pada Juni 2024 menunjukkan angka 73,1%, yang kemudian menurun menjadi 72,2% pada tahun 2025[1]. Penurunan yang berkepanjangan ini menunjukkan bahwa reputasi kepolisian rapuh dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pemberitaan media massa. Di satu sisi, beberapa

prestasi kepolisian yang patut dipuji telah meningkatkan reputasinya; Di sisi lain, perilaku buruk oleh beberapa petugas tertentu terus-menerus menimbulkan publisitas negatif yang merusak kepercayaan publik.

Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) memiliki sistem hubungan masyarakat yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi hubungan masyarakat (public relations) sedang diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari Divisi Hubungan Masyarakat di tingkat Markas Besar, kemudian Divisi Hubungan Masyarakat di tingkat Polda, dan terakhir Seksi Hubungan Masyarakat di tingkat Polres, yang merupakan pelaksana di wilayah tersebut. Keberadaan struktur ini menunjukkan bahwa peran komunikasi publik departemen kepolisian kini menjadi aspek penting dari organisasi. Selain itu, Peraturan Polisi Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 secara eksplisit menjabarkan peran dan tanggung jawab hubungan masyarakat di tingkat kepresidenan[2]. Menurut peraturan tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat bertugas melakukan pekerjaan hubungan masyarakat, mengelola informasi, menyajikan statistik, dan menyimpan catatan pekerjaan kepolisian untuk dilihat publik.

Di wilayah Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa peristiwa yang memperoleh perhatian publik dan menjadi sorotan media. Pada tahun 2021[3], seorang oknum anggota kepolisian dari Polsek Jetis ditangkap saat diduga terlibat pesta narkoba di sebuah vila di Kecamatan Trawas. Kasus tersebut mendapat perhatian media nasional dan ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur dengan penegasan bahwa institusi tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum[4]. Selanjutnya, pada tahun 2025 hingga 2026, kasus ledakan rumah seorang oknum anggota Polri di Mojokerto yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan kerusakan sejumlah rumah warga kembali menjadi perhatian publik. Berbagai pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan individu aparat kepolisian dapat berkembang menjadi isu publik yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.

Di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap berbagai pemberitaan tersebut, institusi kepolisian dituntut mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu bentuk pengelolaan komunikasi tersebut terlihat ketika Polres Mojokerto memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan mengenai dugaan pelepasan beberapa pengguna obat-obatan terlarang yang beredar di salah satu media daring. Melalui klarifikasi resmi, Polres Mojokerto membantah informasi tersebut, menjelaskan kronologi yang sebenarnya, serta menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan tidak melalui proses verifikasi kepada pihak kepolisian. Langkah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi melalui media menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas informasi sekaligus meminimalkan berkembangnya persepsi negatif di tengah masyarakat.

Humas Polres Mojokerto, yang dipimpin oleh Iptu Suyanto SH dengan total sembilan personel, berfungsi sebagai unit pendukung pimpinan dalam mengelola hubungan kemasyarakatan melalui dua sub-seksi utama, yaitu PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk manajemen data serta Penmas (Penerangan Masyarakat) untuk hubungan media. Secara teknis, tim ini diperkuat oleh staf khusus video, dokumentasi, admin, editing, dan tim siber yang melakukan pemantauan media selama 24 jam untuk menangani isu melalui mekanisme take down, klarifikasi, atau counter opini. Dalam menjalankan tugasnya, mereka mengedepankan prinsip informasi satu pintu di bawah kewenangan Kapolres, menjalin kedekatan dengan jurnalis melalui program "Piramida", serta aktif mendokumentasikan setiap tahapan kasus menonjol, seperti kasus mutilasi di Pacet, guna memastikan transparansi informasi dan mencegah penyimpangan narasi di ruang publik.

Unit ini secara aktif meningkatkan profesionalisme SDM melalui program inovatif "Coaching Clinic". Program ini menggandeng praktisi media profesional (Radar Mojokerto) untuk melatih seluruh anggota polisi sesuai fungsi kehumasan di setiap personel—agar mahir dalam teknik jurnalistik, fotografi, hingga public speaking. Hubungan dengan media dijaga secara intensif melalui forum rutin "Piramida" (Ngopi Bareng Awak Media) serta koordinasi harian 24 jam melalui grup WhatsApp yang beranggotakan 28 media resmi terverifikasi Dewan Pers. Dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait kasus hukum, Humas memegang teguh prinsip faktual dan normatif (pro yustisi) tanpa dramatisasi demi menghindari bias informasi, sekaligus untuk menghadapi tantangan opini liar dari fenomena "netizen pokoke" di ruang digital. Seluruh informasi publik dikelola melalui sistem satu pintu di bawah otoritas Kapolres atau didelegasikan kepada Kasi Humas.

Upaya membangun citra institusi tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan isu dan hubungan dengan media, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program yang mencerminkan komitmen Polres Mojokerto dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terlihat dari pemberian penghargaan kepada personel Sihumas Polres Mojokerto yang dinilai berprestasi dalam menghasilkan konten kreatif pada media sosial sebagai sarana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota Polres Mojokerto atas profesionalitas dan prestasi yang diraih sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja kepolisian. Di bidang komunikasi publik, Polres Mojokerto turut melaksanakan program Polri Go to School melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan memberikan edukasi mengenai karakter, kesadaran hukum, bahaya narkoba, serta literasi bermedia sosial kepada para pelajar[5]. Macam-macam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun citra institusi tidak hanya dilakukan melalui publikasi informasi, tetapi juga melalui komunikasi yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Strategi komunikasi yang dilakukan Humas Polres Mojokerto juga memperoleh perhatian dari masyarakat. Berdasarkan komentar oleh Dwiki, seorang asisten advokat di Kantor Hukum Subur Jaya Law Firm sekaligus masyarakat Kabupaten Mojokerto, strategi komunikasi Humas Polres Mojokerto dinilai telah menunjukkan efektivitas melalui pendekatan yang humanis, optimalisasi media sosial, serta pelaksanaan program tatap muka secara langsung dengan masyarakat. Meskipun demikian, narasumber juga menilai bahwa Humas Polres Mojokerto perlu semakin sigap dalam meredam hoaks maupun pemberitaan viral yang melibatkan oknum kepolisian agar tidak berkembang menjadi persepsi negatif di masyarakat. Selain itu, penyampaian pesan-pesan edukatif dinilai perlu dikemas secara lebih kreatif agar mampu menarik perhatian generasi muda di media digital. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memberikan apresiasi terhadap berbagai strategi komunikasi yang telah dilakukan, tetapi juga memiliki ekspektasi terhadap peningkatan kualitas media relations sebagai bagian dari upaya membangun dan mempertahankan image kepolisian.

Berbagai pemberitaan yang berkaitan dengan institusi kepolisian, termasuk yang terjadi di wilayah Mojokerto, berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra kepolisian. Dalam situasi tersebut, Humas Polres Mojokerto dituntut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengelola hubungan dengan media agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat, transparan, dan berimbang.

Media relations merupakan salah satu bagian penting dalam kerja public relations. Melalui media relations, organisasi dapat membangun hubungan yang baik dengan media massa agar informasi dapat tersampaikan secara tepat, cepat, dan luas kepada publik. Dalam kajian Yosol Iriantara, terdapat tiga strategi utama yang dapat digunakan dalam media relations, yaitu mengelola relasi, mengembangkan strategi, dan mengembangkan jaringan.[6]

Strategi pertama adalah mengelola relasi dengan media. Hubungan yang baik akan menciptakan rasa saling percaya, sehingga media lebih terbuka dalam menerima informasi dari organisasi. Jika hubungan dengan media terjaga dengan baik, maka organisasi akan lebih mudah memperoleh dukungan pemberitaan yang positif dan proporsional.

Strategi kedua adalah mengembangkan strategi media relations. Strategi ini mencakup tujuan komunikasi, sasaran media, pesan yang ingin disampaikan, serta cara penyampaian informasi yang efektif. Misalnya, saat menghadapi krisis, organisasi harus menyiapkan pernyataan resmi, memilih juru bicara yang tepat, dan menentukan waktu penyampaian informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Strategi ketiga adalah mengembangkan jaringan. Media relations tidak hanya berhubungan dengan satu atau dua media, tetapi perlu membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai jenis media dan pihak pendukung lainnya. Jaringan yang luas akan memudahkan organisasi dalam menyebarkan informasi ke audiens yang berbeda-beda. Semakin luas jaringan yang dimiliki, semakin besar pula peluang organisasi untuk mendapatkan ruang pemberitaan. Ketiga dimensi ini menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana Seksi Humas Polres Mojokerto menjalankan fungsi kehumasannya.

Citra adalah gambaran atau kesan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap sesuatu (Ardianto, 2011). Citra positif dapat meningkatkan kepercayaan, simpati, dan dukungan terhadap sesuatu. Sebaliknya, citra negatif dapat mengurangi kepercayaan, simpati, dan dukungan terhadap sesuatu.[7]

Pembentukan citra adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Citra dapat berubah seiring dengan pengalaman, informasi, dan opini yang diterima oleh seseorang atau kelompok.[7] Tindakan indisipliner atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota bukan lagi sekadar masalah pribadi, melainkan memiliki dampak besar yang dapat merusak dan menurunkan citra Kepolisian secara keseluruhan di mata publik. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menjadi sangat krusial sebagai pedoman standar perilaku. Melalui penegakan kode etik serta upaya pembinaan dan konseling yang terstruktur, institusi berupaya untuk meminimalisasi pelanggaran tersebut demi menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kembali citra positif Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.[8] Yang berarti, citra institusi kepolisian bersifat dinamis dan rentan berubah seiring pemberitaan media, sehingga pengelolaan media relations yang baik menjadi krusial dalam membentuk dan menjaga citra positif institusi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran dan strategi kehumasan dalam membangun citra suatu institusi. Penelitian oleh Zahro dan Diana yang berjudul *Public Relations Strategies in Improving Brand Image and Institutional Competitiveness in the Digital Era*(2025).[9] menunjukkan bahwa strategi public relations melalui media sosial dan komunikasi langsung mampu meningkatkan citra institusi, meskipun masih menghadapi kendala pada sumber daya manusia. Selanjutnya, penelitian oleh Pamungkas yang berjudul *Strategi Komunikasi Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Jalanan* (2025) [10]. mengungkapkan bahwa strategi komunikasi humas Polda DIY melalui media massa dan media sosial dengan pendekatan transparansi dan humanis dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Penelitian lain oleh Pradisya et al. yang berjudul *The Role of Media Relations and Information Disclosure in the Positive Image of the South Tangerang Police*(2025) menekankan pentingnya media relations dan keterbukaan informasi dalam membangun citra positif kepolisian, terutama melalui pemanfaatan media digital dan kerja sama dengan media lokal[11]. Selain itu, penelitian Zulham et al. yang berjudul *Strategic Management of Police Public Relations in Delivering Public Services: A Case Study of the Tanah Karo Regional Police*(2025) pada tingkat Polres menunjukkan bahwa strategi komunikasi humas dilakukan melalui pendekatan multi-channel, namun masih menghadapi kendala dalam konsistensi pesan dan mekanisme umpan balik.[12]

Penelitian terdahulu mengenai citra kepolisian umumnya berangkat dari konteks krisis berskala nasional dan berfokus pada level Mabes Polri atau Polda. Putri, Afrilia, dan Istiyanto (2024) meneliti strategi pemulihan citra Polri melalui akun Twitter *@DivHumas_Polri* pasca Tragedi Kanjuruhan,[13] sementara Putri (2023) mengkaji strategi manajemen krisis Humas Polda Metro Jaya dalam kasus Ferdy Sambo[14], dan Surachman serta Hutapesa (2026) menganalisis komunikasi krisis Polri pasca kerusuhan Mako Brimob Kwitang[15]. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan pola: berfokus pada institusi tingkat Mabes/Polda, merespons krisis besar yang telah mencuat secara nasional, dan menggunakan kerangka teori pemulihan citra pasca-krisis. Pola ini menunjukkan bahwa kajian media relations kepolisian yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif, meneliti bagaimana humas bertindak setelah citra institusi rusak. Penelitian mengenai praktik media relations yang bersifat rutin dan berkelanjutan di level pelaksana teknis, seperti Polres, masih jarang ditemukan, padahal di level inilah relasi dengan media dibangun secara harian dan berkesinambungan, bukan semata sebagai respons darurat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi media relations Polres Mojokerto menggunakan kerangka tiga dimensi Iriantara (2008), mengelola relasi media, mengembangkan strategi komunikasi, dan membangun jaringan media, sebagai pendekatan proaktif dalam membangun citra institusi, alih-alih semata sebagai mekanisme pemulihan pasca-krisis.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana strategi media relations yang dijalankan oleh Seksi Humas Polres Mojokerto dalam upaya meningkatkan citra positif institusi kepolisian, ditinjau dari tiga dimensi media relations menurut Iriantara (2008)? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi media relations Humas Polres Mojokerto dalam mengelola relasi dengan media, mengembangkan strategi komunikasi, dan membangun jaringan media, sebagai upaya membangun citra positif institusi di mata publik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Jl. Gajah Mada No.99, Menanggal, Kec. Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61382. Hal ini dipilih secara sengaja karena merupakan unit yang secara langsung bertanggung jawab menangani Media Relations di tingkat kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nasional Nomor 2 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yakni berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian[16]. Penelitian ini melibatkan tiga informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap aktivitas media relations Humas Polres Mojokerto. Informan pertama adalah Iptu Suyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Humas Polres Mojokerto yang telah menjabat selama kurang lebih sepuluh bulan. Sebagai penanggung jawab fungsi kehumasan, informan ini dipilih karena memiliki pemahaman langsung mengenai strategi media relations yang diterapkan oleh institusi.

Informan kedua adalah Moch. Chariris selaku Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Mojokerto. Sebagai pimpinan redaksi media lokal yang secara rutin berinteraksi dengan Polres Mojokerto, informan ini dipilih untuk memberikan perspektif eksternal mengenai hubungan kerja sama antara media dan kepolisian. Informan ketiga adalah Rizal Amrulloh, Staf Redaksi Jawa Pos Radar Mojokerto yang bertugas meliput wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan peliputan dan interaksi sehari-hari dengan Humas Polres Mojokerto memberikan informasi yang relevan mengenai implementasi strategi media relations di lapangan.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sekaligus memungkinkan pengembangan pertanyaan secara lebih mendalam sesuai dengan konteks jawaban informan, sehingga menghasilkan data yang lebih kaya dan mendalam. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali pengalaman, pandangan, dan praktik informan secara kontekstual. Kerangka ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi media relations dalam membangun citra institusi. Seluruh proses wawancara dilakukan dengan persetujuan informan, termasuk dalam hal perekaman percakapan.

Penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang memiliki tiga langkah yang terjadi secara bersamaan, untuk menganalisis data. Pertama, reduksi data adalah proses seleksi, memfokuskan, dan penyederhanaan data mentah wawancara berdasarkan penekanan studi pada teknik Media Relations. Kedua, penyajian data adalah tindakan menyusun data yang lebih kecil menjadi cerita deskriptif yang terorganisir dengan baik berdasarkan tiga metode Media Relations Iriantara. Ketiga, mengembangkan kesimpulan dan memeriksanya berarti mencari tahu apa arti hasil studi dengan mencari pola dalam data dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan.[17]

Teknik triangulasi sumber memastikan bahwa data tersebut asli. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari informan di dalam departemen Humas Kepolisian Mojokerto dengan data dari informan di antara jurnalis media lokal (Sugiyono, 2019). Data dianggap sah dan dapat digunakan untuk analisis jika kedua sumber tersebut sepakat. Di sisi lain, jika ada perbedaan, peneliti melihat data lebih dekat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, penelitian ini menemukan bahwa strategi media relations Humas Polres Mojokerto dilaksanakan melalui tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Iriantara (2008), yaitu mengelola relasi dengan media, mengembangkan strategi komunikasi, dan membangun jaringan media. Ketiga dimensi tersebut dijalankan secara terpadu melalui komunikasi yang terbuka, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, serta penguatan kemitraan dengan media massa. Temuan penelitian kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap penelitian terdahulu dan dikaitkan dengan

upaya peningkatan citra kepolisian sebagai tujuan utama strategi media relations yang dijalankan oleh Humas Polres Mojokerto.

A. MENGELOLA RELASI DENGAN MEDIA

Menurut temuan penelitian, hubungan Humas Polres Mojokerto dengan media tidak hanya terbentuk melalui mekanisme formal seperti siaran pers, tetapi juga melalui komunikasi informal yang berkelanjutan. salah satunya yaitu Forum Piramida, forum ini adalah singkatan dari “Ngopi Bareng Awak Media”, forum ini diadakan secara rutin, memberikan kesempatan bagi polisi dan jurnalis untuk membahas berbagai topik berita dan mengembangkan hubungan interpersonal. Pembentukan forum ini menunjukkan bahwa Humas Polres Mojokerto Kepolisian Mojokerto memandang media bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses komunikasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum Piramida berfungsi sebagai saluran komunikasi antara kepolisian dan media, sekaligus menyediakan platform untuk menilai interaksi bilateral. Di forum tersebut, jurnalis memiliki kesempatan untuk mengartikulasikan berbagai tantangan yang mereka hadapi, termasuk keterlambatan perolehan informasi, siaran pers yang kurang memadai, dan perubahan protokol publikasi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Iptu Suyanto mengungkapkan bahwa Humas Polres Mojokerto memanfaatkan forum diskusi bersama media sebagai wadah untuk membahas isu-isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi opini liar. Forum tersebut juga digunakan sebagai media evaluasi terhadap efektivitas publikasi yang telah dilakukan, di mana wartawan didorong untuk memberikan masukan secara langsung terkait kualitas rilis maupun hambatan komunikasi yang terjadi. Dengan demikian, setiap kendala dalam penyampaian informasi dapat diidentifikasi dan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Sebaliknya, Humas Polres Mojokerto menggunakan platform ini untuk menjelaskan kebijakan baru dan mendapatkan umpan balik untuk penilaian internal. Lebih lanjut, masukan yang diberikan wartawan tidak berhenti pada tahap diskusi, melainkan ditindaklanjuti melalui mekanisme evaluasi yang oleh informan disebut sebagai pendekatan bottom-up.

Iptu Suyanto menjelaskan bahwa Humas Polres Mojokerto menerapkan pola komunikasi bottom-up dalam membangun hubungan dengan media. Melalui pola tersebut, wartawan diberikan ruang untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap rilis atau kegiatan publikasi yang dinilai masih kurang optimal sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya. Sebaliknya, Humas juga menyampaikan berbagai kebijakan maupun arahan terbaru dari pimpinan yang perlu dipahami dan dijalankan bersama oleh seluruh mitra media. Dengan demikian, komunikasi yang terjalin bersifat dua arah dan mendorong terciptanya kesepahaman antara Humas dengan media (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa relasi yang dibangun tidak bersifat satu arah, tetapi mencerminkan pola komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan perbaikan bersama antara institusi kepolisian dan media. Pernyataan ini didukung oleh dua jurnalis yang ikut serta dalam penelitian tersebut. Mereka sepakat bahwa komunikasi dengan Humas Polres Mojokerto terbuka dan responsif, baik melalui grup media WhatsApp maupun interaksi pribadi di luar acara formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari media, keterbukaan informasi yang diterapkan Humas Polres Mojokerto dinilai telah berjalan dengan baik. Pak Chariris mengungkapkan bahwa Humas Polres Mojokerto bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada media. Menurutnya, setiap kebutuhan konfirmasi dapat dipenuhi dengan cepat, tidak hanya oleh personel Humas, tetapi juga oleh para kepala satuan hingga Kapolres apabila diperlukan. Senada dengan hal tersebut, Pak Rizal menilai bahwa akses terhadap informasi publik maupun proses konfirmasi dengan pihak kepolisian berlangsung dengan mudah. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa terdapat batasan terhadap informasi yang masih berada pada tahap penyelidikan. Dalam praktiknya, Humas tetap menjadi pintu utama komunikasi dengan media, sedangkan untuk penanganan kasus-kasus tertentu, seperti kasus pembunuhan, proses konfirmasi biasanya diarahkan kepada kepala satuan yang membidangi perkara tersebut (Wawancara dengan Pak Chariris, 25 Mei 2026; Wawancara dengan Pak Rizal, 4 Juni 2026).

Contoh ini menggambarkan kemitraan yang saling menguntungkan di mana media memperoleh akses ke informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan, sementara polisi memperoleh kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum melalui media massa.

Pola relasi yang ditemukan ini sesuai dengan dimensi pertama strategi media relations Iriantara (2008), yaitu mengelola relasi, yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang saling menguntungkan (mutualistik) antara humas dan media. Relasi yang dibangun Humas Polres Mojokerto mencerminkan prinsip keseimbangan (balance) di mana kepolisian membutuhkan publikasi dan media membutuhkan informasi yang akurat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Polres Mojokerto membangun relasi dengan media melalui komunikasi yang berkelanjutan, baik dalam bentuk formal maupun informal. Relasi formal diwujudkan melalui penyebaran informasi, konferensi pers, dan grup WhatsApp media, sedangkan relasi informal dilakukan melalui forum Piramida, kunjungan ke media, serta komunikasi personal yang berlangsung hampir setiap hari. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan relasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembangunan kedekatan interpersonal antara institusi dan media.

Hal itu juga sejalan dalam penelitian Pradisya et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan hubungan yang baik dengan media merupakan faktor penting dalam membangun citra positif institusi kepolisian. Persamaan keduanya terletak pada upaya menjaga komunikasi yang terbuka dan responsif kepada media. Namun demikian, penelitian ini menemukan bentuk implementasi yang lebih spesifik, yaitu forum Piramida sebagai sarana evaluasi dua arah antara kepolisian dan wartawan yang memungkinkan penyampaian kritik, kendala lapangan, serta perbaikan mekanisme komunikasi secara bersama-sama.

Selain itu, temuan ini juga mendukung penelitian Zulham et al. (2025) yang menyatakan bahwa strategi komunikasi humas kepolisian perlu dijalankan melalui berbagai saluran komunikasi yang terintegrasi [12]. Humas Polres Mojokerto tidak hanya memanfaatkan media digital melalui grup WhatsApp dan distribusi informasi daring, tetapi juga mempertahankan interaksi tatap muka secara rutin. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa relasi media yang efektif tidak hanya bergantung pada teknologi komunikasi, tetapi juga pada kualitas hubungan interpersonal yang dibangun secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dibangun Humas Polres Mojokerto tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang dialog dan evaluasi bersama. Wartawan diberikan kesempatan menyampaikan kritik maupun kendala lapangan, sementara pihak humas menindaklanjuti masukan tersebut melalui evaluasi internal dan program peningkatan kapasitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurnisya et al. (2021) yang menekankan pentingnya mutual understanding antara institusi kepolisian dan publik sebagai fondasi hubungan yang berkelanjutan.

Pengelolaan relasi media yang dilakukan secara terbuka dan konsisten memberikan kontribusi terhadap pembentukan citra positif Polres Mojokerto. Hubungan yang harmonis dengan wartawan memungkinkan informasi mengenai kegiatan dan kinerja kepolisian tersampaikan secara lebih akurat kepada masyarakat. Selain itu, keterbukaan dalam memberikan klarifikasi terhadap isu atau pemberitaan yang berkembang turut meningkatkan kepercayaan media terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu indikator citra positif karena menunjukkan adanya persepsi bahwa Polres Mojokerto merupakan institusi yang transparan, responsif, dan profesional dalam memberikan informasi kepada publik.

B. MENGEMBANGKAN STRATEGI

Strategi media relations yang dikaji selanjutnya dalam penelitian ini adalah pengembangan strategi komunikasi, yang mencakup perencanaan komunikasi, pemilihan instrumen, konsistensi pesan, serta mekanisme evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara, Humas Polres Mojokerto telah memiliki sistem strategi komunikasi yang terstruktur, meskipun terdapat perbedaan persepsi antara pihak internal dan jurnalis mengenai tingkat proaktivitasnya.

Iptu Suyanto menjelaskan bahwa Humas Polres Mojokerto menyusun perencanaan kegiatan media relations secara periodik, meliputi rencana harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Penyusunan rencana tersebut berpedoman pada Kalender Kamtibmas, yaitu dokumen yang memetakan dinamika keamanan dan

ketertiban masyarakat sepanjang tahun. Melalui kalender tersebut, Humas dapat mengidentifikasi potensi gangguan yang diperkirakan muncul pada momen-momen tertentu, seperti perayaan tahun baru, hari besar keagamaan, maupun bulan Ramadan yang umumnya diiringi dengan meningkatnya potensi tawuran, balap liar, dan gangguan ketertiban lainnya. Berdasarkan pemetaan tersebut, Humas Polres Mojokerto dapat melakukan langkah antisipatif sejak dini, seperti menyiapkan materi publikasi, imbauan, maupun flyer edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi preventif (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Dengan demikian, Humas tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai perencana komunikasi yang mendukung kesiapsiagaan institusi dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat.

Iptu Suyanto menjelaskan bahwa Humas Polres Mojokerto memanfaatkan grup WhatsApp yang beranggotakan 28 media resmi yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers sebagai sarana utama dalam mendistribusikan informasi kepada media. Melalui grup tersebut, Humas secara rutin membagikan narasi berita beserta dokumentasi foto dan video sehingga wartawan yang tidak dapat hadir secara langsung tetap memperoleh bahan publikasi yang lengkap. Selain berfungsi sebagai media distribusi informasi, grup WhatsApp tersebut juga menjadi kanal komunikasi yang berlangsung selama 24 jam, di mana wartawan dapat melakukan konfirmasi terkait berbagai peristiwa, seperti kasus kriminal maupun kecelakaan, kapan pun dibutuhkan. Sementara itu, untuk penyebaran informasi yang bersifat edukatif dan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Humas lebih mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, guna menjangkau masyarakat secara lebih luas (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Penilaian kedua jurnalis terhadap kualitas informasi ini cukup positif dari sisi konsistensi, namun Pak Rizal mencatat bahwa format rilis yang terlalu formal kerap kurang sesuai dengan kebutuhan media arus utama seperti Radar Mojokerto, sehingga wartawan perlu aktif mengolah ulang informasi agar lebih komunikatif bagi pembaca.

Pak Chariris menjelaskan bahwa Humas Polres Mojokerto menunjukkan sikap yang proaktif dalam menjalin hubungan dengan media. Menurutnya, Humas berperan sebagai garda terdepan yang secara aktif menghubungi wartawan melalui grup koordinasi (Pokja) ketika terdapat informasi atau rilis mengenai kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, seperti pengungkapan tindak kejahatan. Selain itu, komunikasi antara Humas dan media juga berlangsung secara timbal balik melalui koordinasi dan pertukaran informasi mengenai berbagai program maupun kegiatan kepolisian. Pola komunikasi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang aktif dan berkesinambungan antara Humas Polres Mojokerto dengan mitra media (Wawancara dengan Pak Chariris, 25 Mei 2026).

Sebaliknya, Pak Rizal menilai strategi komunikasi Humas bersifat 50-50: reaktif di awal kejadian karena terikat prosedur hukum penyelidikan, namun berubah menjadi sangat proaktif setelah proses hukum selesai dan kasus siap dipublikasikan. Perbedaan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pola interaksi masing-masing wartawan, Pak Rizal sendiri mengakui bahwa Humas cenderung lebih responsif kepada wartawan yang aktif berkomunikasi secara personal setiap hari dibandingkan yang hanya menunggu rilis resmi. (Wawancara dengan Pak Rizal, 04 Juni 2026). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat proaktivitas Humas tidak sepenuhnya seragam, melainkan bersifat relasional dan bergantung pada intensitas kedekatan personal antara Humas dan wartawan yang bersangkutan.

Dalam menghadapi situasi krisis atau isu sensitif, Iptu Suyanto menjelaskan bahwa Humas Polres Mojokerto menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian dari standar operasional dalam menjalankan komunikasi dengan publik dan media. Menurutnya, upaya menutupi suatu permasalahan justru berpotensi memunculkan spekulasi dan meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pelaksanaan tugas, Humas memilih untuk menyampaikannya secara terbuka, mengakui kesalahan yang terjadi, serta melakukan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi. Prinsip tersebut menunjukkan komitmen Humas Polres Mojokerto dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan akuntabel (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Selain itu, Humas Polres Mojokerto memiliki Tim Siber yang bertugas melakukan patroli siber selama 24 jam untuk memantau perkembangan informasi di ruang digital. Dalam pelaksanaannya, tim tersebut memonitor sekitar 200 hingga 300 tautan atau konten setiap hari yang mencakup isu-isu pada tingkat lokal,

regional, hingga nasional. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk memberikan informasi secara cepat kepada pimpinan mengenai perkembangan situasi yang berpotensi mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui pemantauan tersebut, Humas dapat melakukan deteksi dini terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, termasuk isu yang berpotensi menimbulkan keresahan atau kegaduhan, sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Selain melakukan pemantauan isu, Tim Siber juga menganalisis tanggapan masyarakat terhadap informasi yang dipublikasikan, mengelola pengaduan yang masuk melalui media digital, serta meneruskan laporan masyarakat kepada satuan fungsi atau Polsek terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam praktiknya, tim ini juga berperan dalam mendeteksi potensi penyebaran informasi yang tidak akurat maupun opini publik yang berpotensi berkembang secara liar, sehingga memungkinkan Humas melakukan klarifikasi dan respons secara cepat. Dengan fungsi tersebut, Tim Siber tidak hanya berperan sebagai unit pemantau media, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mendukung efektivitas strategi komunikasi dan pengelolaan citra institusi kepolisian di era digital. Evaluasi dilakukan secara pasca-kegiatan melalui diskusi dengan media dan pemantauan respons netizen sebagai indikator keberhasilan.

Temuan ini sejalan dengan Pamungkas (2025) yang menyimpulkan bahwa strategi komunikasi dengan pendekatan transparansi dan humanis terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa karakteristik yang membedakan Humas Polres Mojokerto dengan temuan Zulham et al. (2025). Humas Polres Mojokerto menggunakan Kalender Kamtibmas sebagai dasar perencanaan komunikasi tahunan yang memetakan berbagai potensi isu dan agenda strategis, seperti hari besar keagamaan, pengamanan pemilu, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Humas Polres Mojokerto didukung oleh Tim Siber yang melakukan patroli media dan media sosial selama 24 jam untuk memantau perkembangan isu publik secara real-time. Keberadaan Kalender Kamtibmas dan Tim Siber menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga bersifat preventif dan antisipatif dalam mengelola informasi serta menjaga citra kepolisian di tengah dinamika media digital yang terus berkembang.

Strategi komunikasi yang terencana, didukung oleh pemantauan isu secara berkelanjutan melalui Tim Siber, berkontribusi terhadap pembentukan citra positif kepolisian. Melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan transparan, Humas Polres Mojokerto berupaya mencegah berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Upaya tersebut juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai lembaga yang responsif dan terbuka terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

C. MEMBANGUN JARINGAN MEDIA

Strategi media relations yang dikaji selanjutnya adalah membangun jaringan media, yang mencakup cakupan mitra media, mekanisme koordinasi, fasilitas pendukung, serta program pengembangan kapasitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Mojokerto telah membangun jaringan media yang terstruktur dan beragam, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan verifikasi sebagai dasar kemitraan jangka panjang.

Iptu Suyanto menjelaskan bahwa Humas Polres Mojokerto membangun jaringan media yang terdiri atas 28 media resmi yang tergabung dalam grup komunikasi. Jaringan tersebut mencakup berbagai jenis media, seperti media cetak, media daring, radio, hingga televisi nasional yang memiliki biro atau koresponden di wilayah Mojokerto. Dalam menentukan media yang menjadi mitra, Humas menerapkan proses seleksi dengan menjadikan status verifikasi Dewan Pers sebagai syarat utama. Media yang belum memiliki badan hukum atau belum terverifikasi tidak dimasukkan ke dalam grup koordinasi dan hanya dikategorikan sebagai netizen journalism. Melalui mekanisme tersebut, Humas Polres Mojokerto berupaya memastikan bahwa kerja sama media relations dijalankan bersama mitra media yang memiliki kredibilitas dan profesionalisme sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Pak Chariris menerangkan bahwa Humas Polres Mojokerto memperketat proses verifikasi terhadap wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) setelah muncul kasus oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan tindakan pemerasan. Proses verifikasi tersebut dilakukan dengan memeriksa legalitas

perusahaan pers, seperti status badan hukum dan verifikasi Dewan Pers, serta memastikan bahwa wartawan yang bersangkutan telah memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Langkah tersebut menunjukkan komitmen Humas Polres Mojokerto dalam membangun jaringan media yang profesional dan kredibel, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan profesi wartawan yang dapat mengganggu hubungan antara kepolisian dan media (Wawancara dengan Pak Chariris, 25 Mei 2026).

Dalam memelihara jaringan media secara berkelanjutan, Humas Polres Mojokerto menjalankan beberapa mekanisme komplementer. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari media, terdapat perbedaan pandangan mengenai aktivitas media relations yang dinilai paling efektif dalam membangun hubungan antara Humas Polres Mojokerto dengan wartawan. Pak Chariris menilai bahwa kegiatan Piramida atau coffee morning merupakan aktivitas yang paling memberikan manfaat karena forum tersebut tidak hanya menjadi sarana membahas isu-isu strategis, seperti kode etik jurnalistik dan peran media di masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi wartawan untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan secara langsung terkait peningkatan kapasitas serta kompetensi kehumasan Polres. Menurutnya, pola komunikasi yang berlangsung dalam forum tersebut lebih efektif dalam menjaga hubungan baik dibandingkan wawancara formal. Sementara itu, Pak Rizal berpendapat bahwa konferensi pers (press conference) merupakan aktivitas media relations yang paling efektif karena memberikan kesempatan kepada wartawan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai penanganan suatu kasus sekaligus melakukan wawancara langsung dengan Kapolres. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk kegiatan media relations memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda, baik sebagai sarana membangun hubungan interpersonal maupun sebagai media penyampaian informasi secara langsung kepada wartawan (Wawancara dengan Pak Chariris, 25 Mei 2026; Wawancara dengan Pak Rizal, 4 Juni 2026).

Perbedaan penilaian ini mencerminkan orientasi yang berbeda berdasarkan peran : Pemimpin Redaksi lebih memprioritaskan kualitas relasi jangka panjang, sementara wartawan lapangan lebih mengutamakan efisiensi akses informasi aktual. Selain kedua mekanisme tersebut, Humas juga menyediakan ruang pers permanen di area kerja Humas yang dilengkapi meja kerja dan fasilitas WiFi, yang berfungsi sebagai sarana konfirmasi langsung dan pengolahan berita di lokasi.

Aspek yang membedakan jaringan media Humas Polres Mojokerto dari pola konvensional adalah program Coaching Clinic. Coaching Clinic merupakan program pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dirancang oleh Humas Polres Mojokerto untuk memastikan seluruh personel kepolisian memiliki pemahaman dasar mengenai jurnalistik, komunikasi publik, dan pemanfaatan media sosial. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan telah diintegrasikan ke dalam rencana kerja serta anggaran institusi sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi kehumasan. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa setiap anggota Polri merupakan pengemban fungsi kehumasan. (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Iptu Suyanto menjelaskan bahwa Humas Polres Mojokerto menyelenggarakan Coaching Clinic sebagai upaya meningkatkan kompetensi komunikasi personel kepolisian. Program ini memuat berbagai materi yang berkaitan dengan praktik kehumasan, mulai dari teknik pengambilan gambar, pembuatan video, penulisan narasi berita, hingga kemampuan public speaking dan etika berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan publikasi, seperti Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga personel memahami batasan informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Menurut Iptu Suyanto, program tersebut memberikan hasil yang positif, ditandai dengan meningkatnya pemahaman anggota terhadap etika komunikasi, termasuk dalam menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa yang melibatkan korban. Keberhasilan program ini bahkan memperoleh apresiasi sehingga diadopsi oleh Polda untuk diterapkan pada tingkat regional sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan kapasitas kehumasan (Wawancara dengan Iptu Suyanto, 2 Juni 2026).

Program Coaching Clinic yang diselenggarakan Polres Mojokerto bersama Jawa Pos Radar Mojokerto (JPRM) merupakan wujud konkret dari ketiga dimensi media relations Iriantara (2008) yang saling berkelindan. Pada dimensi mengelola relasi media, program ini menunjukkan bentuk kolaborasi yang melembaga antara Humas Polres dan media lokal, dengan melibatkan langsung jajaran redaksi JPRM, Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, dan fotografer, sebagai narasumber pelatihan, bukan sekadar mitra pemberitaan pasif. Pada dimensi mengembangkan strategi komunikasi, materi pelatihan yang diberikan mencerminkan standar jurnalistik praktis, mulai dari teknik dokumentasi visual hingga protokol etika penyampaian informasi sensitif, seperti keharusan menyampaikan ucapan belasungkawa sebelum menyampaikan poin utama pada rilis kasus yang melibatkan korban. Sementara itu, pada dimensi membangun jaringan media, program ini diperkuat oleh landasan regulasi lokal berupa

Peraturan Kapolres Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan seluruh personel, bukan hanya operator humas, untuk mengemban fungsi kehumasan. Perluasan cakupan pelatihan ke 14 jajaran polsek dalam sistem lima rayon turut menunjukkan bahwa membangun jaringan media di tingkat Polres Mojokerto dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar respons situasional. Berdasarkan keterangan dua informan independen, Kasi Humas Polres Mojokerto dan Pemimpin Redaksi JPRM, program ini turut mendapat perhatian dari Polda Jawa Timur yang berencana mengadaptasi dan mengembangkan model serupa, meskipun hal ini masih berupa rencana yang belum sepenuhnya terealisasi.

Di luar jaringan media massa konvensional, Humas Polres Mojokerto juga mengelola platform digital secara aktif melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan situs web resmi, yang dikelola oleh tim internal dengan pengawasan Tim Siber selama 24 jam. Meskipun demikian, kedua jurnalis memberikan catatan kritis yang konsisten: konten media sosial Polres dinilai lebih berfokus pada kegiatan internal institusi, seperti apel dan kunjungan kerja, dibandingkan liputan kejadian aktual yang relevan bagi publik.

Pak Rizal memberikan beberapa masukan terkait pengembangan strategi komunikasi digital Humas Polres Mojokerto melalui media sosial. Menurutnya, konten yang dipublikasikan sebaiknya tidak didominasi oleh kegiatan rutin, seperti apel, upacara, kunjungan kerja, maupun penerimaan tamu, karena aktivitas tersebut merupakan bagian dari tugas sehari-hari kepolisian sehingga kurang memberikan daya tarik bagi masyarakat. Sebaliknya, ia menyarankan agar Humas lebih banyak menampilkan konten yang memperlihatkan kedekatan polisi dengan masyarakat serta berbagai aksi nyata di lapangan yang mencerminkan peran kepolisian dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Menurut Pak Rizal, pendekatan tersebut lebih efektif dalam membangun persepsi positif karena masyarakat cenderung memberikan respons yang lebih baik terhadap konten yang bersifat humanis dan menunjukkan implementasi tugas kepolisian secara langsung (Wawancara dengan Pak Rizal, 4 Juni 2026; 25 Juni 2026).

Catatan yang diberikan kedua jurnalis menunjukkan bahwa pembangunan jaringan media tidak berhenti pada penyediaan saluran komunikasi dan fasilitas pendukung, tetapi juga memerlukan kemampuan institusi untuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan audiens. Kritik mengenai dominasi konten internal dalam media sosial Polres Mojokerto menunjukkan bahwa media sebagai mitra jaringan tidak hanya berfungsi menyebarluaskan informasi, tetapi juga berperan memberikan umpan balik terhadap strategi komunikasi yang dijalankan. Umpan balik tersebut menjadi sumber evaluasi yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperkuat citra kepolisian di ruang digital.

Secara keseluruhan, strategi membangun jaringan media yang dijalankan Humas Polres Mojokerto mencerminkan dimensi ketiga Iriantara (2008) yang menekankan pentingnya membangun jaringan yang beragam, profesional, dan berkelanjutan. Jaringan yang dibangun tidak terbatas pada hubungan transaksional pertukaran informasi, melainkan mencakup kolaborasi pengembangan kapasitas yang memperkuat posisi kedua pihak. Temuan ini sejalan dengan Zulham et al. (2025) yang menekankan bahwa strategi komunikasi multi-channel pada tingkat Polres efektif dalam memelihara kemitraan media, serta Pradisya et al. (2025) yang menggarisbawahi peran keterbukaan informasi dan kerja sama media lokal dalam membangun citra positif kepolisian.

Keberadaan jaringan media yang luas dan terpelihara secara berkelanjutan memberikan kontribusi terhadap pembentukan citra positif kepolisian. Melalui kemitraan yang terjalin dengan media terverifikasi, informasi mengenai program, kinerja, maupun penanganan kasus oleh Polres Mojokerto dapat tersampaikan kepada masyarakat secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, hubungan yang baik dengan media juga memudahkan proses klarifikasi ketika muncul isu atau informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dengan demikian, jaringan media tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan dan citra positif institusi kepolisian.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Humas Polres Mojokerto telah menerapkan strategi media relations yang sesuai dengan tiga dimensi yaitu mengelola relasi dengan media, mengembangkan strategi komunikasi, dan membangun jaringan media. Pengelolaan relasi dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, forum pertemuan rutin dengan wartawan, serta pemanfaatan media komunikasi yang memungkinkan interaksi dua arah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi media relations yang

dijalankan Humas Polres Mojokerto tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun hubungan yang saling menguntungkan antara kepolisian dan media. Hubungan tersebut mendukung terciptanya komunikasi yang lebih terbuka, meningkatkan kepercayaan media terhadap institusi, serta berkontribusi pada pembentukan citra positif kepolisian. Temuan berdasarkan kondisi normal, tidak ada program press tour, dan konten media sosial yang masih terlalu fokus pada kegiatan internal. Implikasi praktis termasuk perlunya peningkatan responsivitas terhadap isu publik dan reorientasi konten media sosial untuk membangun citra yang lebih baik.

REFERENSI

- [1] "Rilis Indikator 27 Mei 2025." Accessed: Apr. 07, 2026. [Online]. Available: <https://indikator.co.id/rilis-indikator-27-mei-2025/>
- [2] Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021."
- [3] Achmad Faizal, "Seorang Polisi di Mojokerto Ditangkap Saat Pesta Narkoba di Vila," *Dheri Agriesta*, Dheri Agriesta, 2021. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2021/10/20/123052878/seorang-polisi-di-mojokerto-ditangkap-saat-pesta-narkoba-di-vila>
- [4] Enggran Eko Budianto, "Oknum Polisi Mojokerto yang Rumahnya Meledak Dituntut 1,5 Tahun Bui," *Detik Jatim*, Detik.com, Jan. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8305742/oknum-polisi-mojokerto-yang-rumahnya-meledak-dituntut-1-5-tahun-bui>
- [5] Muhammad Anwar, "Polres Mojokerto Bekali Peserta MPLS dengan Pendidikan Karakter dan Kesadaran Hukum," MEMORANDUM.DISWAY.ID, Jul. 16, 2026. [Online]. Available: <https://memorandum.disway.id/mojokerto/read/164100/polres-mojokerto-bekali-peserta-mpls-dengan-pendidikan-an-karakter-dan-kesadaran-hukum>
- [6] Dr. Yosol Iriantara, *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik (Edisi Revisi 2019)*.
- [7] Izzul Hudia Alfaza and Prahastiwi Utari, "Kultivasi Citra Kepolisian di Media Sosial," vol. Vol. 17, No. 1, Juni 2024, pp. 81–91.
- [8] Intan Destrilia and Yuditya Wardhana, "STRATEGI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI POLRES KOTA METRO DALAM MEMBANGUN CITRA POLRI PADA MASYARAKAT," vol. Volume 12 Number 2 (Desember) 2024, pp. 454–462.
- [9] "Public Relations Strategies in Improving Brand Image and Institutional Competitiveness in the Digital Era," *Electron. J. Educ. Soc. Econ. Technol.*
- [10] N. A. Pamungkas, "Strategi Komunikasi Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Jalanan".
- [11] I. Pradisya, Y. Rahmawati, and N. A. Praptiningsih, "The Role of Media Relations and Information Disclosure in the Positive Image of the South Tangerang Police," 2025.
- [12] Z. Zulham, H. Szali, and H. J. Ritonga, "Strategic Communication Management of Police Public Relations in Public Service: A Case Study of the Tanah Karo Regional Police," *ETTISAL J. Commun.*, vol. 10, no. 2, Dec. 2025, doi: 10.21111/ejoc.v10i2.12718.
- [13] Wahyu Putri, Ascharisa Mettasatya Afrilia, Rizal Rizky Hermawan Afrilia, and Bakti Istiyanto, "Analisis Wacana pada Akun Twitter @DivHumas_Polri dalam Manajemen Krisis Tragedi Kanjuruhan," vol. Vol. 9 No. 2 (2026): May, Jun. 2026, doi: 10.33822/jep.v7i1.6422.
- [14] Putri and Shafa Nabilla Diaz, "MANAJEMEN KRISIS DALAM MENANGANI CITRA BURUK PADA POLDA METRO JAYA (Studi Kasus Terlibatnya Anggota Polda Metro Jaya Dalam Kasus Ferdy Sambo)," Aug. 2023, [Online]. Available: <https://repository.unas.ac.id/id/eprint/8130/>
- [15] Nurman Surachman and Edison Bonartua Hutapea, "Strategi Komunikasi Krisis dalam Membangun Citra Institusi Polri Pasca Kerusuhan September 2025," vol. Vol 6, No 1 (2026), doi: 10.32509/cyberpr.v6i1.7036.
- [16] B. Rampai, "METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF".
- [17] T. D. Yulianti, Y. Eliza, E. E. Putra, and Y. Andria, "THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN IMPROVING THE POSITIVE IMAGE OF THE POLICE INSTITUTION IN THE WEST SUMATERA REGIONAL POLICE," *jesya*, vol. 7, no. 2, pp. 1332–1341, Jul. 2024, doi: 10.36778/jesya.v7i2.1603.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.